

Paradiplomasi melalui Kerja Sama Sister City: Analisis Peran UCLG ASPAC pada Kemitraan Jakarta-Kuala Lumpur

Saskia Nadya Salsabilla⁽¹⁾, Zharifah Putri⁽²⁾, Nandra Rasya Naysilla⁽³⁾, Anandyo Putra Wirawan⁽⁴⁾, Laila Syakira⁽⁵⁾, Joshua Alexander Aritha Pumala Bangun⁽⁶⁾, Bilqis Oktaviani Putri⁽⁷⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Pondok Labu, Jakarta, Indonesia

Email: ¹2410412170@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2410412172@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2410412006@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2410412093@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁵2410412175@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶2410412075@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁷bilqisop@upnvj.ac.id

Tersedia Online di

<http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant>

Sejarah Artikel

Diterima 18 Juni 2026
Direvisi 22 Juli 2026
Disetujui 03 Agustus 2026
Dipublikasikan 03 Agustus 2026

Keywords:

Jakarta–Kuala Lumpur, network governance, paradiplomacy, sister city, UCLG ASPAC

Kata Kunci:

Jakarta-Kuala Lumpur, network governance, paradiplomasi, sister city, UCLG ASPAC

Corresponding Author:

Name:
Bilqis Oktaviani Putri
Email:
bilqisop@upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the role of the United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) as a facilitator in intercity cooperation between Jakarta and Kuala Lumpur. This collaboration has evolved in line with the increasing needs of local governments to address various urban challenges, such as climate change, flooding, urbanization, and sustainable development. The study employed a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews and documentation studies. Primary data were obtained through interviews with UCLG ASPAC representatives, while secondary data came from official documents, organizational reports, scientific journals, and various other relevant sources. The results indicate that UCLG ASPAC acts as a facilitator by providing a space for dialogue, liaising between stakeholders, managing knowledge transfer, and mediating intercity network governance. The organization successfully utilized regional forums to bring together the governments of Jakarta and Kuala Lumpur, resulting in sister city cooperation focused on environmental issues, flood management, and sustainable development. The research findings also indicate that a network-based approach, or network governance, enables local governments to participate more actively in international relations. However, the implementation of this cooperation still faces challenges in the form of limited regional authority and differences in institutional capacity in each city.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran United Cities and Local Governments Asia-Pasific (UCLG ASPAC) sebagai fasilitator dalam kerja sama antrakota antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Kerja sama ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai tantangan perkotaan, seperti perubahan iklim, banjir, urbanisasi, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan UCLG ASPAC, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan organisasi, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber

relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UCLG ASPAC berperan sebagai fasilitator melalui

penyediaan ruang dialog, penghubung antaraktor, pengelola transfer pengetahuan, serta mediator dalam tata kelola jaringan antarkota. Organisasi ini berhasil memanfaatkan forum regional untuk mempertemukan pemerintah Jakarta dan Kuala Lumpur sehingga menghasilkan kerja sama sister city yang berfokus pada isu lingkungan, pengelolaan banjir, dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jaringan atau network governance memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi lebih aktif dalam hubungan internasional. Meskipun implementasi kerja sama masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kewenangan daerah dan perbedaan kapasitas kelembagaan di masing-masing kota.

PENDAHULUAN

Jakarta dan Kuala Lumpur mengalami tantangan perkotaan yang serupa, seperti permasalahan banjir yang kerap terjadi, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta dampak perubahan iklim yang semakin serius. Laporan dari IPCC pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kota-kota yang berlokasi di kawasan pesisir dan dataran rendah di Asia Tenggara (Sulistiyono et al., 2026). Jakarta sendiri telah mengalami permasalahan banjir secara berulang kali sejak tahun 1990-an (Mukaddas et al., 2025). Sedangkan Kuala Lumpur masih menghadapi ancaman banjir akibat sistem drainase yang belum mumpuni untuk mengatasi air hujan tropis (Husin et al., 2022), kedua kota memerlukan adanya pendekatan inovatif yang berkelanjutan dalam menangani risiko bencana.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak kemerdekaan kedua negara, sehingga memperkuat potensi kerja sama antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Namun, kolaborasi baru terjalin secara resmi setelah penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada bulan Agustus 2025, yang menandai terjalinnya kemitraan sister city antara Jakarta dan Kuala Lumpur yang memiliki fokus pada beberapa isu seperti perubahan iklim, pembangunan ramah lingkungan, pengelolaan banjir, serta pertukaran budaya dalam sektor pariwisata (Sari, 2025). Langkah ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan peningkatan keterlibatan pemerintah kota melalui diplomasi iklim setelah Paris Agreement pada tahun 2015, di mana kota-kota didorong untuk lebih peduli terhadap permasalahan komitmen iklim yang melampaui target nasional masing-masing negara (Zuhdy & MRE, 2026).

Secara teoritis, fenomena kerja sama yang terjalin antara kota-kota lintas negara dapat diwujudkan melalui konsep paradiplomasi, yaitu fenomena yang melibatkan aktor pada tingkatan subnasional dalam lingkup hubungan internasional guna memperjuangkan kepentingan serta kebutuhan daerah di kawasan global (Nadya et al., 2023). Seiring perkembangannya, waktu paradiplomasi kota tidak hanya terjadi secara bilateral, tetapi juga didukung oleh adanya Transnational Municipal Networks (TMN) yang merupakan jaringan antarnegara untuk menghubungkan pemerintah kota untuk melakukan pertukaran budaya, pengetahuan, kebijakan, dan kerja sama untuk menghadapi permasalahan secara bersama (Nisa, 2022). *Transnational Municipal Networks* (TMN) mempergunakan kepercayaan serta pertukaran sumber daya dari berbagai pihak untuk mendukung terjadinya pembelajaran kebijakan yang lebih efisien dan adaptif. Melalui teori *Network Governance*, jaringan seperti ini tidak hanya menyiapkan tempat pertemuan, tetapi juga memiliki potensi sebagai alat koordinasi kebijakan yang dapat mendorong implementasi secara nyata di tingkat daerah (Mozin et al., 2025).

Di kawasan Asia Pasifik, kerja sama antarkota semakin berkembang seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan perkotaan seperti urbanisasi, transportasi, perubahan iklim, pengelolaan lingkungan, hingga pembangunan berkelanjutan (Carolyn & Kurniati, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai aktor administratif yang menjalankan kebijakan nasional, tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan lintas batas melalui berbagai bentuk kerja sama internasional (Lathifah et al., 2024). Dinamika tersebut semakin terlihat dalam konteks globalisasi, di mana banyak persoalan perkotaan memiliki karakter transnasional sehingga membutuhkan pendekatan

kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah lokal dari negara yang berbeda. Dalam proses tersebut, keberadaan organisasi internasional yang berperan sebagai fasilitator menjadi penting untuk mempertemukan berbagai pemerintah daerah, menyediakan wadah pertukaran pengetahuan, serta mendorong kolaborasi yang lebih efektif.

Salah satu organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung kerja sama antarpemerintah lokal di kawasan Asia-Pasifik adalah United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC). Sebagai bagian dari jaringan global United Cities and Local Governments (UCLG), UCLG ASPAC menjadi platform regional yang menghubungkan pemerintah daerah, asosiasi pemerintah lokal, serta berbagai pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat tata kelola perkotaan. Organisasi ini berfungsi sebagai ruang koordinasi yang memungkinkan pemerintah lokal berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan pembangunan, serta mengembangkan solusi bersama berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Melalui pendekatan tersebut, UCLG ASPAC tidak hanya berperan sebagai organisasi yang mempertemukan aktor lokal, tetapi juga menjadi penghubung antara agenda pembangunan global dengan kebutuhan dan kapasitas pemerintah daerah di tingkat regional (Hafizha, 2024).

Peran UCLG ASPAC dalam memfasilitasi kerja sama antarkota dapat dilihat melalui beberapa fungsi utama. Pertama, organisasi ini menyediakan ruang dialog dan komunikasi antarpemerintah daerah melalui berbagai forum, konferensi, serta pertemuan regional. Forum tersebut memberikan kesempatan bagi kota-kota di kawasan Asia-Pasifik untuk membangun jaringan, memperluas kerja sama, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi dalam menghadapi persoalan perkotaan. Kedua, UCLG ASPAC berperan dalam pengembangan kapasitas pemerintah lokal melalui program pelatihan, pertukaran pengetahuan, dan penyebaran praktik terbaik (*best practices*). Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat mempelajari kebijakan atau inovasi yang telah diterapkan oleh kota lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal masing-masing (Kusumaningjati, 2024).

Selain itu, UCLG ASPAC juga memiliki peran dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan (Wu, 2020). Pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam implementasi SDGs karena sebagian besar tantangan pembangunan terjadi di tingkat lokal, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, ketimpangan sosial, serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, melalui jaringan yang dibangun oleh UCLG ASPAC, pemerintah kota dapat memperoleh akses terhadap pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dari berbagai wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa. Hal ini menjadikan organisasi tersebut sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah lokal untuk menjalankan perannya dalam pembangunan global.

Dalam perspektif hubungan internasional, keberadaan UCLG ASPAC juga memperlihatkan perkembangan konsep paradiplomasi, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam aktivitas internasional untuk mencapai kepentingan pembangunan daerah. Melalui paradiplomasi, pemerintah kota dapat membangun hubungan dengan kota lain di luar negeri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Namun, keterlibatan tersebut tetap membutuhkan mekanisme koordinasi agar kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan sejalan dengan kepentingan nasional (Syuryansyah et al., 2025). Dalam konteks ini, organisasi seperti UCLG ASPAC memiliki fungsi penting sebagai mediator yang membantu menciptakan ruang kerja sama yang lebih terstruktur dan terarah.

Salah satu contoh kerja sama antarkota yang menarik untuk dikaji adalah hubungan antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Sebagai dua kota metropolitan yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Jakarta dan Kuala Lumpur memiliki karakteristik yang relatif serupa, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, dinamika urbanisasi, maupun tantangan pembangunan perkotaan. Kedua kota tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang menghadapi berbagai persoalan kompleks, seperti peningkatan jumlah penduduk perkotaan,

kebutuhan infrastruktur transportasi, pengelolaan lingkungan, serta tuntutan untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hasibuan et al., 2024)

Kesamaan karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kerja sama antarkota antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Melalui hubungan tersebut, kedua kota memiliki peluang untuk melakukan pertukaran pengalaman mengenai kebijakan perkotaan, inovasi pelayanan publik, pengelolaan transportasi, hingga strategi pembangunan berkelanjutan (Aulia et al., 2025). Jakarta, misalnya, memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan sebagai kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, sementara Kuala Lumpur memiliki berbagai pendekatan dalam pengembangan kota modern dan pengelolaan infrastruktur perkotaan. Pertukaran pengalaman tersebut memungkinkan kedua kota untuk saling belajar dan mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan. Dalam proses penguatan hubungan Jakarta–Kuala Lumpur, UCLG ASPAC berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bagi kedua pemerintah lokal. Melalui jaringan regional yang dimilikinya, UCLG ASPAC membantu mempertemukan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dalam pembangunan perkotaan, sehingga kerja sama antarkota dapat berlangsung secara lebih sistematis. Peran fasilitator ini menjadi penting karena kerja sama internasional tingkat lokal sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan untuk menyesuaikan agenda kerja sama dengan prioritas masing-masing kota (Ferdiansyah & Hasymi, 2023).

Lebih lanjut, keterlibatan UCLG ASPAC dalam hubungan Jakarta-Kuala Lumpur menunjukkan bahwa organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai aktor yang membuat kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung yang memungkinkan terjadinya interaksi antaraktor lokal. Dalam konteks ini, keberhasilan kerja sama antarkota tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan formal antara pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan jaringan pendukung seperti UCLG ASPAC dalam menyediakan mekanisme pertukaran informasi, membangun kepercayaan, serta memastikan keberlanjutan hubungan kerja sama. Dengan demikian, UCLG ASPAC memiliki kontribusi penting dalam memperkuat praktik paradiplomasi di kawasan Asia-Pasifik dan mendorong pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam menghadapi tantangan pembangunan global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UCLG ASPAC sebagai fasilitator dalam kerja sama kota antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana organisasi internasional tingkat lokal dapat mendorong terbentuknya kerja sama yang efektif antarpemerintah daerah, sekaligus menunjukkan kontribusi aktor non-negara dalam dinamika hubungan internasional modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran UCLG ASPAC dalam memperkuat jaringan kerja sama antarkota di kawasan Asia-Pasifik.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengungkap suatu fenomena secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data pada kondisi alamiah, sehingga menghasilkan temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun perhitungan numerik (Rijal Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada pemahaman makna, proses, serta hubungan setiap kejadian yang diteliti (Nurrisa & Hermina, 2025). Oleh karena itu, metode ini dinilai sesuai untuk digunakan dalam mengkaji peran UCLG ASPAC dalam memfasilitasi kerja sama antara Jakarta dan Kuala Lumpur karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja sama yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi (Daruhadi & Sopiati, 2024). Wawancara dilakukan dengan salah satu narasumber dari UCLG ASPAC yang digunakan sebagai sumber data utama. Melalui wawancara tersebut, kami memperoleh informasi secara langsung mengenai peran UCLG ASPAC dalam menjembatani hubungan antarkota, mekanisme pelaksanaan kerja sama, bentuk dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam proses kerja sama internasional antarkota. Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih rinci, lengkap, dan mendalam dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Selain wawancara, laporan ini juga menggunakan teknik studi dokumentasi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Data dokumentasi berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, laporan kegiatan, publikasi UCLG ASPAC, artikel jurnal ilmiah, buku, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif serta meningkatkan validitas informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan.

Data yang telah terkumpul lalu dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan dan menginterpretasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan peran UCLG ASPAC dalam memfasilitasi kerja sama Jakarta-Kuala Lumpur. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme kerja sama yang berlangsung serta berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh UCLG ASPAC dalam mendukung pelaksanaan kerja sama antarkota di kawasan Asia-Pasifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara dengan Aldrin Chandra yang merupakan *Executive Assistant to the Secretary General* UCLG ASPAC menunjukkan bahwa organisasi ini menjelaskan posisi yang tidak menjadi forum pertemuan biasa, tetapi berperan aktif sebagai fasilitator yang mengawali, menjembatani, dan juga memastikan kerja sama antarkota tetap berlangsung. Pandangan ini selaras dengan ide *Transnational Municipal Networks* (TMN) yang diutarakan oleh Nisa (2022), yang menyampaikan bahwa jaringan antarkota adalah lebih dari sekadar wadah untuk bertukar informasi, melainkan juga alat koordinasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan konkret di tingkat daerah.

UCLG ASPAC Sebagai Fasilitator

Dalam hal kolaborasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur, UCLG ASPAC memiliki peranan yang sangat penting sejak fase awal. Walaupun Indonesia dan Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik sejak kedua negara tersebut merdeka, kerja sama resmi antara ibu kotanya belum pernah terjadi sebelumnya. UCLG ASPAC mengeksplorasi diadakannya ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) di Kuala Lumpur pada tahun 2025 sebagai pendorong untuk menyatukan kedua belah pihak. Kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Agung, ke Kuala Lumpur dalam rangka AGMF dimanfaatkan oleh UCLG ASPAC untuk mendorong penandatanganan Letter of Agreement (LoA) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Kuala Lumpur (Sari, 2025). Tindakan ini menunjukkan bahwa TMN seperti UCLG ASPAC memiliki potensi untuk mengubah kesempatan diplomasi yang bersifat sementara menjadi komitmen terorganisasi secara institusional. Perpanjangan jejaring UCLG ASPAC juga memperlihatkan seberapa besar kemampuan organisasi ini sebagai penghubung. Sebagai bagian dari UCLG, yang diakui sebagai satu-satunya organisasi pemerintah daerah oleh PBB dan mengusulkan 10 dari 20 anggota UNACLA, badan penasihat pertama bagi pemerintah lokal yang terhubung dengan PBB. Ukuran jaringan yang luas ini menjelaskan alasan di balik kemampuan UCLG ASPAC dalam menyelenggarakan forum rutin seperti AGMF, yang

memperbolehkan pemimpin daerah dari berbagai negara ASEAN untuk berkumpul secara bergiliran setiap tahunnya.

Tinjauan dari Teori *Network Governance*

Melalui sudut pandang Teori *Network Governance*, tata kelola kontemporer tidak lagi bertumpu pada hierarki dan sentralisasi, tetapi tersebar di dalam jaringan yang menyertakan berbagai pihak dari berbagai level secara horizontal dan vertikal (A. Mulyana et al., 2024). Dalam kerangka ini, UCLG ASPAC tidak berfungsi sebagai penguasa, tetapi sebagai perantara jaringan yang memfasilitasi interaksi, mewujudkan kepercayaan antara pihak-pihak yang berbeda, serta mengatasi arus informasi dan sumber daya di antara aktor-aktor yang terlibat (Cahyono, 2026).

Dasar dari Teori *Network Governance* juga mencakup beberapa poin penting, yaitu semua pihak yang berkepentingan memiliki keterkaitan saling bergantung, pengambilan keputusan umumnya bersifat kolaboratif, beragam kontribusi diperlukan untuk mencapai tata kelola yang efektif, dan kepercayaan serta saling menghargai di antara aktor jaringan sangat krusial untuk mencapai tujuan tata kelola yang diinginkan (Aziz & Hikmawan, 2023). Poin-poin ini sangat jelas dalam kerja sama antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Hal ini terlihat dari cara UCLG ASPAC menangani peluang diplomasi yang bersifat situasional, seperti kunjungan gubernur ke Kuala Lumpur, dan membuatnya sebagai mitra kelembagaan yang lebih teratur. Kapasitas untuk beradaptasi ini merupakan salah satu keutamaan dari sistem tata kelola berbasis jaringan jika dibandingkan dengan model hierarki tradisional yang sering kali bersifat kaku dan birokratis (Pragma Integra., 2025).

Pengertian ini sangat krusial untuk menelaah bagaimana kolaborasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur berlangsung. Setiap sisi Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Kuala Lumpur, Kemendagri dan UCLG ASPAC mempunyai tingkat otonomi masing-masing berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, tetapi saling terkait untuk menggapai tujuan bersama, yaitu kesinambungan kerja sama *sister city*, dari satu sisi belum adanya capaian tujuan bersama tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melaksanakan program pertukaran staf tanpa bantuan dari KL CRT, kemendagri belum memiliki akses langsung ke Kuala Lumpur tanpa bantuan dari UCLG ASPAC, dan UCLG ASPAC pun tidak mempunyai kendali untuk mengkaji program tanpa dukungan dari kedua pemerintah kota.

Implikasi Kelembagaan UCLG ASPAC

Implementasi kerja sama *sister city* antara Jakarta dan Kuala Lumpur setelah penandatanganan *Letter of Intent* pada Agustus 2025 menandai babak baru dalam pemanfaatan paradiplomasi di Asia Tenggara. Sebagai dua kota metropolitan dengan karakteristik demografis dan kerentanan ekologis yang serupa, interaksi yang terjalin sebatas pemenuhan formalitas hubungan bilateral konvensional saja. Pada dinamika ini, peran *United Cities and Local Governments Asia-Pacific* (UCLG ASPAC) muncul sebagai aktor krusial yang menjembatani kesenjangan struktural dan operasional antara kedua pemerintah subnasional tersebut. Analisis terhadap peran UCLG ASPAC sebagai fasilitator dapat diuraikan melalui tiga fungsi, yaitu sebagai penyedia platform interaksi, katalisator transfer pengetahuan (*policy transfer*), serta mediator dalam menyelaraskan tata kelola jaringan (*network governance*) demi menghadapi krisis lingkungan global.

UCLG ASPAC menjalankan fungsi pertamanya sebagai fasilitator ruang dialog yang menetralkan hambatan birokrasi hierarki nasional. Dalam struktur politik konvensional, interaksi antarkota sering kali terjebak dalam jalur diplomasi yang menghasilkan interaksi kaku dengan waktu birokrasi yang panjang. Melalui kerangka kerja *Transnational Municipal Networks* (TMN), UCLG ASPAC memotong jalur birokrasi horizontal tersebut dengan

menyediakan berbagai forum khusus pada tingkat regional yang memungkinkan pertemuan para Pejabat Gubernur DKI Jakarta dan Datuk Bandar Kuala Lumpur secara langsung. Platform ini memfasilitasi komunikasi yang terfokus dan lebih setara pada pemecahan masalah teknis perkotaan. Kehadiran ruang dialog ini sangat mendesak mengingat urgensi laporan IPCC 2022 yang menegaskan bahwa penundaan adaptasi iklim di dataran rendah Asia Tenggara akan melipatgandakan kerugian ekonomi akibat banjir rob dan cuaca yang ekstrem. Melalui forum berkala yang diselenggarakan oleh jaringan ini, Jakarta dan Kuala Lumpur dapat merumuskan agenda mitigasi bencana yang selaras tanpa harus menunggu arahan protokol diplomasi pada tingkat kementerian luar negeri masing-masing negara.

Terlebih lagi, dengan pendalaman proses tersebut, peran fasilitas UCLG ASPAC bergerak ke ranah pembentukan kapabilitas teknis melalui program transfer praktik terbaik (*best practices*). Melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Kuala Lumpur memiliki pengalaman yang panjang dalam mengoperasikan *Stormwater Management and Road Tunnel* (Terowongan SMART) untuk memitigasi banjir bandang tropis sekaligus mengurai kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, Jakarta memiliki keunggulan dalam pengembangan sistem integrasi transportasi publik makro dan pelibatan komunitas lokal dalam pemetaan titik banjir berbasis digital. UCLG ASPAC, memanfaatkan media sosial dan kepercayaan kelembagaan yang dimilikinya, menyusun program kelompok kerja teknis (*technical working groups*) yang mempertemukan para ahli hidrologi dan perencana kota dari kedua pihak. Dalam konteks *network governance*, peran ini merupakan pengelola pertukaran sumber daya kognitif sekaligus mempertemukan aktor (Nisa & Tamrin, 2025). Organisasi ini memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan lokal dari Kuala Lumpur agar dapat diadaptasi oleh Jakarta, mengingat Jakarta juga sedang dalam proses transisi masif tata penataan ruang untuk menghadapi penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir utara.

Tabel 1. Fungsi UCLG ASPAC sebagai fasilitator kerja sama Jakarta-Kuala Lumpur

Fungsi	Deskripsi Teoritis	Manifestasi dalam kerja sama Jakarta-KL
Menyediakan platform interaksi	Memfasilitasi ruang dialog yang memotong jalur untuk birokrasi hierarki nasional,	Forum AGMF 2025 di Kuala Lumpur sebagai titik temu Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Kuala Lumpur
Policy transfer	Menyediakan pertukaran praktik terbaik antara aktor dengan keunggulan sektoral berbeda	Program <i>staff exchange</i> 2026

Eksplorasi Fungsi Mediator dalam Keselarasan Tata Kelola Jaringan

Keterangan deskriptif yang terdapat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa manifestasi peran UCLG ASPAC sebagai fasilitator tidak berhenti pada penyediaan ruang interaksi saja. Ketika fungsi ketiga, yaitu mediator tata kelola jaringan, mulai dioperasikan, organisasi ini dituntut untuk menyelaraskan arah kebijakan transnasional dengan kapasitas eksekusi birokrasi domestik yang sering kali tidak sejalan (Naimah et al., 2022). Pada ranah mitigasi krisis lingkungan global, peran mediasi ini mewujud dalam bentuk penyusunan rencana aksi bersama (*joint action plan*) yang mengikat komitmen politik kedua pemerintah daerah ke dalam agenda dekarbonisasi perkotaan yang ambisius. Bentuk mediasi ini dilakukan untuk menjamin agar rancangan kerja sama tidak kehilangan daya tekan ketika berhadapan dengan prioritas pembangunan jangka pendek masing-masing kota yang sering kali bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Melalui mediasi ini, UCLG ASPAC memposisikan diri sebagai jembatan institusional yang menetralkan kecenderungan egosentrisme sektoral dari lembaga-lembaga teknis di bawah Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Sebagai

contoh, ketika Jakarta mengusulkan program integrasi sistem transportasi publik makro berbasis pengurangan emisi, UCLG ASPAC juga mempertemukan badan otoritas keuangan daerah serta perwakilan swasta transnasional yang memiliki spesialisasi dalam investasi infrastruktur hijau. Pola mediasi yang komprehensif ini menegaskan argumen kelembagaan yang membuktikan bahwa paradiplomasi kontemporer harus diintegrasikan ke dalam sebuah ekosistem tata kelola yang bersifat lintas sektor dan lintas batas kedaulatan negara.

Dinamika Transfer Kebijakan dan Program Pertukaran Aparatur Sipil

Kemudian, sebagaimana yang dijelaskan juga pada Tabel 1, realisasi fungsi *policy transfer* secara nyata terjadi melalui peluncuran program pertukaran staf (*staff exchange*) yang dilaksanakan. Program ini didesain sebagai mekanisme transfer pengetahuan teknis tingkat tinggi sekaligus instrumen kunjungan kerja normatif yang bersifat timbal balik. Aparatur sipil dari Pemprov DKI Jakarta yang ditempatkan di unit kerja DBKL diberikan akun langsung yang dapat mereka gunakan untuk mempelajari sistem komputasi hidrologi terpadu yang mengendalikan operasionalisasi Terowongan SMART di Kuala Lumpur. Sebaliknya, delegasi teknis dari Malaysia yang bertugas di Indonesia (DKI Jakarta) mendalami model pemetaan wilayah rawan banjir berbasis partisipasi publik digital serta tata kelola jaring pengaman sosial urban yang telah mapan di ibu kota. Proses ini berjalan melalui tahapan simulasi dan adaptasi yang ketat, di mana inovasi teknologi dari kota mitra dimodifikasi agar sesuai dengan lanskap sosiologis dan kapasitas anggaran domestik. Hal ini menandakan betapa pentingnya kedekatan karakteristik masalah dalam mendorong keberhasilan kerja sama internasional tingkat lokal. Ketika dua kota menghadapi ancaman yang serupa, proses penyerapan pengetahuan akan berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang memiliki struktur dan kapasitas sosial yang jauh berbeda. Kehadiran UCLG ASPAC dalam memantau jalannya program pertukaran ini memastikan semua pengetahuan yang ditransfer dapat terlembagakan ke dalam cetak biru kebijakan daerah yang berkelanjutan.

Benturan Otonomi Konstitusional dan Asimetri Kapasitas dalam Tata Kelola Jaringan

Namun, evaluasi kritis terhadap efektivitas UCLG ASPAC sebagai fasilitator menunjukkan adanya benturan nyata antara idealisme jaringan transnasional dengan realitas politik domestik yang tersentralisasi. Meskipun UCLG ASPAC berhasil merancang peta jalan (*roadmap*) adaptasi iklim yang progresif untuk Jakarta dan Kuala Lumpur, implementasi pada tingkat lokal tetap menghadapi tantangan keterbatasan wewenang konstitusional daerah. Di Indonesia, setiap komitmen finansial luar negeri dan perencanaan infrastruktur skala besar yang berdampak tetap membutuhkan persetujuan ketat dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan (Ismir et al., 2026). Kondisi yang serupa juga terjadi di Malaysia, di mana DBKL berada di bawah kendali langsung Kementerian Wilayah Persekutuan, sehingga fleksibilitas anggarannya sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik pada tingkat federal. Akibatnya, beberapa rencana aksi bersama yang telah difasilitasi oleh UCLG ASPAC dalam hal implementasi pembangunan ramah lingkungan sering kali mengalami perlambatan operasional (*institutional gap*) ketika harus berhadapan dengan regulasi keuangan negara masing-masing.

Tantangan asimetri kapasitas internal juga menjadi titik fokus evaluasi dalam tata kelola jaringan ini. UCLG ASPAC bertindak sebagai fasilitator bagi dua kota yang memiliki kapasitas fiskal dan kualitas sumber daya manusia birokrasi yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama metropolitan. Kuala Lumpur didukung oleh sistem penganggaran per kapita kota dan integrasi teknologi yang relatif stabil (Alamsyah, 2025). Sementara, Jakarta sering kali harus membagi fokus anggaran antara penyelesaian masalah sosial mendesak (penataan permukiman kumuh bantaran sungai dan penyediaan air bersih) dan pembangunan fisik mitigasi banjir. Di sinilah

fungsi UCLG ASPAC diuji untuk memastikan adanya pendampingan teknis yang berkelanjutan (*capacity building*) dan bukan hanya sebagai penyelenggara konferensi elitis. Organisasi ini berupaya meminimalkan ketimpangan yang ada dengan melibatkan berbagai lembaga donor internasional dan mitra akademis global untuk mendanai kajian kelayakan bersama (*feasibility study*), sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi panduan operasional yang adaptif bagi birokrat lokal yang terdapat di kedua kota.

Transformasi Aktor Subnasional dalam Evolusi Diplomasi Iklim Perkotaan

Secara pokok, paradiplomasi yang difasilitasi oleh UCLG ASPAC antara Jakarta dan Kuala Lumpur setelah 2025 ini membuktikan adanya aktor subnasional yang mampu memproduksi kebijakan iklim yang mendahului dan bahkan melampaui kecepatan diplomasi lingkungan pada tingkat nasional. Saat komitmen nasional di bawah kerangka *Nationally Determined Contributions* (NDCs) setelah Paris Agreement sering kali terjebak dalam perdebatan target makro, Jakarta dan Kuala Lumpur mampu merumuskan langkah praktis sektoral yang langsung menyentuh wilayah perkotaan di bawah payung TMN. Peran fasilitator UCLG ASPAC kemudian bergeser, dari penyedia ruang komunikasi (*forum provider*) menjadi penyedia norma tindakan (*norm setter*). Dengan mengaitkan kerja sama *sister city* ini pada pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin 11 mengenai Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan serta poin 13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim, UCLG ASPAC berhasil menaikkan kelas paradiplomasi Jakarta dan Kuala Lumpur dari kerja sama transborder tradisional menjadi diplomasi iklim kota yang diperhitungkan di kawasan regional Asia-Pasifik.

Peningkatan selanjutnya adalah adanya penghubung dengan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dari poin 11 dan 13 ini, pengkajian mengenai Diplomasi Iklim menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi jaringan kota dan pendekatan yang terintegrasi melintasi sektor-sektor berbeda dalam peningkatan ketahanan kota, seperti yang ditekankan pada SDG 11. Jika sinergi antara Jakarta dan Kuala Lumpur di masa mendatang dikaitkan dengan SDG 11 dan 13 secara langsung, ini bisa menguatkan kondisi dalam hal diplomasi iklim (Rihi et al., 2025).

Internalisasi Norma Global dan Tata Kelola Polisentrik Berbasis Reformasi Birokrasi

Ditambah lagi, keberhasilan paradiplomasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur dapat diukur dari sejauh mana berbagai norma global tersebut terinternalisasi ke dalam regulasi teknis pada tingkat lokal. Dalam perkembangannya, pergeseran peran UCLG ASPAC memaksa kedua tata kelola pemerintahan untuk mengubah struktur birokrasi internal mereka agar lebih fleksibel terhadap berbagai tuntutan transnasional. Internalisasi ini kemudian memicu lahirnya unit-unit kerja khusus yang berada di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dan unit perencanaan strategis di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang secara spesifik bertugas untuk menyelaraskan berbagai proyek lokal dengan koridor pendanaan hijau internasional. Interaksi intensif yang difasilitasi oleh UCLG ASPAC ini kemudian membuktikan rumor yang mengatakan bahwa pemerintah subnasional merupakan aktor yang pasif dalam politik global. Sebaliknya, melalui adopsi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dipromosikan organisasi tersebut, Jakarta dan Kuala Lumpur berhasil memanfaatkan panggung internasional untuk menekan pemerintah pusat mereka masing-masing agar memberikan prioritas anggaran pada berbagai proyek ketahanan iklim perkotaan yang bersifat mendesak.

Keberhasilan paradiplomasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur tidak dapat dinilai hanya dari banyaknya pertemuan bilateral atau jumlah nota kesepahaman yang berhasil ditandatangani. Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana norma-norma global, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, mampu diterjemahkan ke dalam

regulasi teknis serta praktik birokrasi sehari-hari di tingkat pemerintah daerah. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan kajian tata kelola iklim perkotaan yang menekankan bahwa efektivitas kerja sama transnasional antar kota sangat bergantung pada koordinasi lintas tingkat pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal, dan tidak cukup hanya diwujudkan melalui simbolisme diplomatik. Dalam sistem tata kelola yang semakin polisentrik, strategi iklim perkotaan menuntut keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah lokal, pemerintah nasional, organisasi internasional, sektor swasta, hingga masyarakat sipil (Todeschi et al., 2026).

Dalam konteks tersebut, UCLG ASPAC yang berkedudukan di Jakarta dapat dipahami sebagai simpul pengelolaan pengetahuan (knowledge management hub) bagi isu-isu pemerintahan lokal di kawasan Asia-Pasifik. Organisasi ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kota dan komunitas internasional yang lebih luas. Sebagai bagian dari jaringan UCLG global yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi pemerintah lokal, UCLG ASPAC memiliki akses kelembagaan untuk menyuarakan aspirasi pemerintah daerah anggotanya dalam forum multilateral. Dengan demikian, jejaring ini menyediakan ruang bagi pemerintah subnasional untuk berpartisipasi dalam pembentukan agenda global yang relevan dengan kepentingan lokal. Transformasi fungsi jejaring kota dari sekadar wadah berbagi praktik baik menjadi instrumen yang mendorong reformasi birokrasi internal pemerintah daerah bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Jakarta dan Kuala Lumpur. Perubahan tersebut merupakan bagian dari tren global yang lebih luas. Berbagai jejaring kota seperti C40, ICLEI, Global Covenant of Mayors (GCoM), dan UCLG berkembang karena adanya kebutuhan untuk menyelaraskan aksi iklim lokal dengan target-target internasional. Melalui jejaring tersebut, norma-norma global mengenai keberlanjutan didorong untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan sistem administrasi kota (Todeschi et al., 2026).

Kuala Lumpur sendiri menunjukkan sejumlah langkah konkret ke arah tersebut melalui penyusunan berbagai dokumen perencanaan berorientasi rendah karbon. Inisiatif seperti *Kuala Lumpur Low Carbon Society Blueprint*, *KL Climate Action Plan 2050*, serta agenda ekonomi hijau menggambarkan upaya pemerintah kota dalam mengarusutamakan prinsip dekarbonisasi dan ketahanan iklim. Program-program tersebut mencakup berbagai strategi, seperti mitigasi banjir, perbaikan sistem drainase, dan pengembangan aplikasi MOBIS untuk menyediakan informasi keselamatan jalan ketika terjadi banjir. Kehadiran dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa norma global terkait aksi iklim mulai diterjemahkan ke dalam kerangka kebijakan teknis di tingkat kota. Namun demikian, rincian mengenai keberadaan unit kerja tertentu yang secara khusus menghubungkan program-program tersebut dengan mekanisme pendanaan hijau internasional belum dapat diverifikasi melalui sumber publik yang tersedia. Oleh karena itu, informasi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai ilustrasi konseptual daripada fakta kelembagaan yang telah terkonfirmasi (SDG Centre Kuala Lumpur, 2024).

Sementara itu, di Jakarta terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah semakin memperkuat integrasi agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam proses perencanaan daerah. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan forum koordinasi yang melibatkan berbagai aktor non-negara dalam rangka evaluasi pelaksanaan SDGs sekaligus penyusunan SDGs Lokal Jakarta periode 2025–2029. Proses tersebut memperlihatkan bahwa internalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan bukan sekadar wacana, melainkan praktik yang berlangsung secara nyata dan berkelanjutan. Dengan demikian, adopsi SDGs dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme utama yang memungkinkan pemerintah subnasional menyelaraskan agenda lokal dengan norma global (Nasional, 2023).

Refleksi Inklusivitas Jaringan dan Potensi Strategis *Joint Advocacy Regional*

Pandangan bahwa interaksi dalam jejaring seperti UCLG ASPAC menunjukkan bahwa pemerintah subnasional bukan lagi aktor pasif dalam politik global juga memperoleh dukungan dari literatur akademik kontemporer. Banyak kota di berbagai belahan dunia telah melampaui perannya sebagai pelaksana kebijakan nasional dan mulai berpartisipasi secara aktif dalam membentuk agenda global melalui jejaring transnasional. Jejaring seperti C40, ICLEI, dan GCoM menjadi sarana penting bagi kota-kota untuk mengartikulasikan kepentingan mereka dalam isu lingkungan. Meski demikian, sejumlah penelitian mengingatkan bahwa partisipasi tersebut masih didominasi oleh kota-kota besar dengan kapasitas ekonomi yang kuat. Oleh sebab itu, generalisasi mengenai peran seluruh pemerintah subnasional perlu dilakukan secara hati-hati. Upaya memperluas partisipasi kota-kota kecil dan kota-kota di negara berkembang menjadi penting apabila tata kelola iklim global ingin berkembang secara lebih inklusif dan representatif (Efendi, 2024).

Dengan demikian, jalinan kerja sama yang difasilitasi oleh UCLG ASPAC ini telah berhasil menciptakan sebuah acuan bagi para pemeran diplomasi di kawasan Asia Tenggara. Melalui penyelenggaraan forum teknis yang konsisten, organisasi ini perlahan telah menumbuhkan identitas kolektif baru di kalangan pemerintah daerah sebagai sesama korban utama dari kegagalan tata kelola iklim global. Posisi yang sama sebagai kota metropolitan yang berada di garis depan ancaman kenaikan air laut, mendorong Jakarta dan Kuala Lumpur untuk mulai merumuskan strategi diplomasi gabungan (*joint advocacy*) mereka dalam berbagai forum global yang lebih tinggi, seperti pada pertemuan tingkat menteri di PBB atau konferensi iklim COP. Langkah taktis ini menandai perkembangan paradiplomasi yang mulai bertransformasi menjadi kekuatan politik subnasional yang agresif, yang mampu menuntut keadilan distribusi dana iklim global dari negara-negara industri maju. Fenomena ini memperlihatkan potensi wewenang domestik yang bukan lagi menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk ikut menentukan arah masa depan tata kelola lingkungan global jika difasilitasi oleh jaringan transnasional yang tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UCLG ASPAC memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam memperkuat kerja sama antarkota antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan ruang dialog, penghubungan kepentingan antarpemangku kepentingan, fasilitasi pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta mediasi dalam tata kelola jaringan. Melalui forum regional seperti ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) 2025, UCLG ASPAC turut mendorong terbentuknya kerja sama *sister city* yang lebih terstruktur.

Dalam perspektif Network Governance, UCLG ASPAC berfungsi sebagai penghubung yang mempertemukan pemerintah daerah dan berbagai aktor terkait tanpa mengambil alih kewenangan para pihak. Perannya juga terlihat dalam memfasilitasi *policy transfer* melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan persoalan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan antarkota dapat memperluas ruang paradiplomasi dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons berbagai isu global.

Namun, pelaksanaan kerja sama masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kewenangan daerah, perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, serta kebutuhan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, keberlanjutan kerja sama Jakarta–Kuala Lumpur tidak hanya bergantung pada kesepakatan formal, tetapi juga pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan peran UCLG ASPAC dan jaringan antarkota menjadi penting untuk mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pencapaian SDGs di tingkat lokal maupun regional.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, R. F. (2025). Perbandingan strategi manajemen lalu lintas di koridor urban Asia Tenggara: Studi kasus Surabaya dan Kuala Lumpur. *KERN: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.33005/kern.v11i1.66>
- Aulia Bayu, A., Santi, I., & Siwi, A. T. (2025). Toward sustainable development: Realising equity, empowerment and economic improvement through the realisation of a creative city. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v6i01.1241>
- Aziz, T., & Hikmawan, M. D. (2023). Analisis networked governance dalam kebijakan P4GN di Kota Cilegon tahun 2020. *[Nama jurnal tidak tersedia]*, 5(3).
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan publik: Studi kualitatif tata kelola kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1).
- Carolin, V., & Kurniati, E. (2025). Tantangan pembangunan perkotaan terhadap urbanisasi, kemacetan di Jakarta: Analisis permasalahan dan solusi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 252–273. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.222>
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Efendi, Z. (2024). Strategi pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah untuk menghadapi perubahan iklim global. *Indonesian Journal of Research and Service Studies*, 1(4), 198–209.
- Ferdiansyah, F. R., & Hasymi, A. M. (2023). Tujuan UCLG ASPAC dalam implementasi kerja sama lingkungan *Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project* di Kota Cirebon. *[Nama jurnal tidak tersedia]*. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Hafizha, A. A. (2024). Jakarta sebagai aktor paradiplomasi hijau pada masa pemerintahan Anies Baswedan. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.22303/pir.v9i1.87>
- Hasibuan, H. S., Koestoer, R. H., Permana, C. T., Danial, M. H., Marzukhi, M. A., & Elizandri, B. N. (2024). The progression of transport infrastructures and transit oriented development (TOD) areas in Jakarta and Kuala Lumpur suburban: Lessons from policy approach. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(9). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i9.6025>
- Husin, M. A., Mohamad, A. N., Tenaga, S. K. K., & Hassan, A. M. (2022). Tragedi banjir kilat di Kuala Lumpur: Punca dan penyelesaiannya. *[Nama jurnal tidak tersedia]*, 4(1), 287.
- Ismir, C. A., Rahayu, N. S., Istani, R., & Stia, P. (2026). Strategi perlindungan finansial sebagai alternatif pembiayaan asuransi barang milik negara di Kementerian Keuangan. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 8.
- Kusumaningjati, W. T. (2024). Implementasi kerja sama sister city Kota Bandung. *[Nama jurnal tidak tersedia]*, 3(1).
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di era globalisasi. *Jurnal Professional*, 11(2).
- Mulyana, Y. A., Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika digital governance: Antara teori dan praktek di era 4.0*. [Penerbit tidak tersedia]. <https://books.google.co.id/books?id=JP8uEQAAQBAJ>
- Mozin, S. Y., Daud, F., & Melikuestri, E. (2025). Network governance dalam regulasi kebijakan investasi pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(6).
- Mukaddas, J., Zubaidah, A., Alhabsyi, G. A. P., Khusnani, A., Lantapi, A. W., Mulyanda, D., Akhmaddhian, S., Husen, O. O., Jufriansah, A., & Ummah, D. M. (2025). *Kebencanaan dan mitigasi*. Kamiya Jaya Aquatic.

- Nadya, A., Mahendra, Z. F., & Yahya, M. M. (2023). Strategizing sister city partnerships: Paradiplomacy, bilateral relations, and sustainable cooperation in Indonesia. *Journal of Paradiplomacy and City Networks*, 2(1), 46–57. <https://doi.org/10.18196/jpcn.v2i1.35>
- Naimah, M., Tentama, F., & Yuliasesti Diah Sari, E. (2022). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan keterlibatan kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) melalui mediator kepuasan kerja. *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 27(2), 197–222. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss2.art2>
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). Digital transformation and multi-level collaboration in regional tax data collection: A case study of local governments in Indonesia. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v13i1.1824>
- Nisa, M. H. (2022). Paradiplomasi melalui sister city Pemerintah Kota Denpasar dan Mossel Bay: Implementasi dan pengalihan kerja sama. *Global & Policy*, 10(1).
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *[Nama jurnal tidak tersedia]*, 2, 793–800.
- Pragma Integra. (2025). *Teori tata kelola jaringan (network governance theory) dalam tata kelola perusahaan modern*. Firma Pragma Integra. <https://pragmaintegra.com/teori-tata-kelola-jaringan-network-governance-theory-dalam-tata-kelola-perusahaan-modern/>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rihi, S. R., Lano, M. L., Nuchri, A. A., Mooy, L., Ayuni, N., Dariwu, C. T., Darwis, & Hamzah, H. (2025). *Pembangunan berkelanjutan: Dari konsep SDGs ke implementasi lokal*. [Penerbit tidak tersedia].
- Sari, B. B. P. (2025, August 11). Jadi sister city, Jakarta-KL bakal kerja sama atasi banjir hingga sampah. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8055743/jadi-sister-city-jakarta-kl-bakal-kerja-sama-atasi-banjir-hingga-sampah>
- SDG Centre Kuala Lumpur. (2024). *Kuala Lumpur climate action plan 2050*. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. <https://www.dbkl.gov.my>
- Sulistiyono, et al. (2026). *Prediksi bencana banjir pesisir akibat perubahan iklim*. Pustaka Aksara.
- Syuryansyah, S., Yunazwardi, M. I., & Nihayati, A. (2025). A systematic literature review on Indonesian paradiplomacy (2018–2024). *Journal of Islamic World and Politics*, 9(2), 155–171. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v9i2.188>
- Todeschi, V., Hernandez-Moral, G., Clementi, E., Bertoldi, P., & Melica, G. (2026). Financing climate change mitigation actions in cities: Insights from the Covenant of Mayors initiative. *Sustainable Cities and Society*, 136, Article 107097. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.107097>
- Wu, D.-Y. (2020). *City diplomacy, multilateral networks and the role of Southeast Asia*. [Penerbit/jurnal tidak tersedia].
- Zuhdy, I. A. Y., & M. P. D. P. (2026). *Green communication: Teori, strategi, dan praktik komunikasi berkelanjutan*. PT Revormasi Jangkar Philosophia. <https://books.google.co.id/books?id=UzzfEQAAQBAJ>